

## **EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT**

**Salsabila<sup>1</sup>, Yayuk Eko Wahyuningsih<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar

E-mail: [yayukew@utu.ac.id](mailto:yayukew@utu.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penyerapan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Adapun yang menjadi ruang lingkup yang diambil oleh penulis adalah anggaran pendidikan tahun 2017 – 2022. Analisis penelitian yang digunakan adalah analisis efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat atau kriteria efektivitas penyerapan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017-2021 mempunyai kriteria efektivitas yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2017 dan yang terendah terjadi pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2017 kriteria efektivitas nya sangat efektif, pada tahun 2018 sampai 2021 kriteria efektivitas nya efektif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari cukup efektif menjadi sangat efektif. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat untuk tetap dapat mempertahankan prestasi ini.

Kata Kunci: Anggaran Pendidikan, Efektivitas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### **Abstract**

*This study aims to determine the level of effectiveness of budget absorption at the Education and Culture Office of West Aceh Regency. The scope taken by the author is the education budget for 2017 – 2022. The research analysis used is an analysis of effectiveness. The results showed that the level or criteria for the effectiveness of budget absorption at the Education and Culture Office of West Aceh Regency in 2017-2021 had varying effectiveness criteria. The highest level of effectiveness in 2017 and the lowest occurred in 2021. Furthermore, in 2017 the effectiveness criteria were very effective, in 2018 to 2021 the effectiveness criteria were effective. This shows that the effectiveness of budget absorption that has been budgeted has been well implemented by the Education and Culture Office of West Aceh Regency, for a period of 5 (five) years from quite effective to very effective. To the Education and Culture Office of West Aceh Regency to continue to be able to maintain this achievement.*

Keywords: *Education Budget, Effectiveness, Education and Culture Office*

## **1. PENDAHULUAN**

Pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa memiliki peranan yang sangat strategis. Pendidikan berkontribusi dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu, terampil, kreatif, inovatif, serta memiliki *attitude* (sikap dan perilaku) yang

positif. Sebagaimana Suparno Erman, dalam Soedijarto (2008) mengatakan kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memiliki fungsi yang hakiki dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi aktor-aktor pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan yang bersangkutan (Brown & Ghiselli, 1955; Danim, 2012).

Berkaitan dengan fungsi tersebut, berjalannya sistem pendidikan tidak lepas dari perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan maupun sistem politik dalam bernegara (Janur, 2009a; Kuncoro, 2018; Martadisastra, 2002). Pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia (SDM), walaupun usaha pengembangan SDM tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal (sekolah). Tetapi sampai saat ini, pendidikan masih dipandang sebagai sarana dan wahana utama untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan dengan sistematis, programatis, dan berjenjang.

Berdasarkan konteks inilah pendidikan terasa semakin dituntut peranannya, khususnya untuk dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan sehat jiwanya. Bahkan yang paling membanggakan adalah pendidikan dimanifestasikan sebagai senjata pamungkas untuk memberantas kemiskinan, sejauh apa yang diperoleh peserta anak didik itu relevan dengan kebutuhan hidup mereka (Hj, 2004; Janur, 2009b). Oleh karena itu Pendidikan nasional harus dilaksanakan secara merata, adil, relevan, berkualitas dan efisien bagi seluruh rakyat sampai ke daerah pelosok tanah air.

Untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah benar-benar mengarah pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, akan terlihat pada sejauh mana konsistensi antara perencanaan dan implementasi program (Arsyad, 1999; Epidemiologi, 2010). Konkritnya adalah konsistensi antara perencanaan pendidikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan program yang diimplementasikan setiap tahun dengan menggunakan dana APBD.

Secara tegas (*eksplisit*) Anggaran Pendidikan dua puluh persen (20%) yang dijabarkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 29, disebutkan bahwa dana pendidikan 20% dari APBN dan APBD adalah di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Pada sisi yang lain, pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, adalah bertujuan agar pemerintah dalam memberikan pelayanan publik termasuk di bidang pendidikan semakin efektif dan efisien.

Hasil penelitian Anggara & Pilawati (2019) menunjukkan bahwa berdasarkan indikator tiga dimensi penyerapan anggaran langsung secara umum telah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, *namely* mengenai persetujuan anggaran yang belum tepat waktu, kurangnya sumber daya manusia (karyawan) dan ada program yang belum tercapai secara efektif dan efisien sehingga mempengaruhi penyerapan pengeluaran langsung yang belum optimal (Handayani et al., 2017). Upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan cara menyetujui anggaran secara tepat waktu, mengusulkan peningkatan jumlah karyawan dan melakukan sosialisasi kepada karyawan tentang anggaran yang akan *policy* digunakan dalam melaksanakan kegiatan program apa pun yang telah ditentukan sebelumnya sehingga penyerapan anggaran dapat segera diserap secara optimal (Sutrisno, 2021).

Sementara hasil penelitian (Rachman, 2017) adalah bahwa pada Dinas Pendidikan Kota Bandung terdapat faktor pendukung yaitu faktor pertama, pelaksanaan dokumen pengadaan

yang baik. Faktor kedua, sistem pengawasan dalam penyerapan anggaran. Faktor ketiga, sumber daya manusia (SDM) yang mendukung. Faktor keempat yaitu sarana dan prasarana yang mendukung. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu faktor Pertama, kurangnya antara perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan yang tidak sesuai. Faktor kedua, ketidaksesuaian antara program dan kegiatan serta anggaran. Dan faktor yang ketiga yaitu terjadinya keterlambatan waktu. Lalu untuk meminimalisir hambatan yang ada di dinas pendidikan kota bandung yaitu dengan melakukan upaya perencanaan dan pengalokasian anggaran harus lebih matang dan melakukan sosialisasi mengenai penyerapan anggaran kepada pegawai.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat dapat memberikan informasi serta membuat analisis bagaimana kinerja keuangan berupa analisis belanja.

Berdasarkan data yang didapatkan menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Aceh Barat kian membaik terlihat dari beberapa indikator, diantaranya angka partisipasi pendidikan. Dengan telah tercapainya beberapa kemajuan dari pembangunan pendidikan di Aceh Barat, harapannya dapat menciptakan sumber daya manusia unggul sehingga *Output* yang dihasilkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang kompetitif. Untuk mengejar target tersebut, berbagai langkah perbaikan baik fisik maupun non fisik, seperti sumber daya manusia terus ditingkatkan. Selanjutnya berdasarkan sumber BPS Aceh Barat tahun 2017 penyaluran dana untuk pendidikan, hanya memiliki pendapatan untuk operasionalnya melalui dana BOS yang bersumber dari APBN. Besaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima oleh satuan pendidikan dasar pada Tahun 2013 sebesar Rp. 580.000,- dikalikan jumlah anak yang ada di masing-masing satuan pendidikan (SD/SMP), artinya apabila satuan pendidikan (SD) tersebut memiliki 192 orang siswa dikalikan Rp. 580.000,- sehingga total uang operasional satuan pendidikan tersebut selama satu tahun adalah Rp. 111.360.000,-. (BPS Kabupaten Aceh Barat 2021)

Dengan penjelasan tersebut, pertanyaan dalam penelitian ini adalah seberapa efektif penyerapan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pendidikan**

Berdasarkan segi etimologis pendidikan berasal dari bahasa Yunani "*paedagogike*", ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata "*pais*" yang berarti "anak" dan kata "*ago*" yang berarti "aku membimbing". Jadi *paedagogike* berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar dalam bahasa Yunani disebut "*paedagogos*". Jadi pendidikan adalah usaha untuk membimbing anak, (Soedomo 2008 dalam Ritonga (2020)).

Pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2003) diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Definisi pendidikan lainnya yang dikemukakan oleh M. J. Langeveld dalam Baswir (2010) bahwa:

1. Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan.
2. Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil-baliq dan bertanggung jawab.
3. Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani.

Pengertian tersebut bermakna bahwa, pendidikan merupakan kegiatan untuk membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian. Hal ini dilakukan guna membekali anak untuk menapaki kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi dapat dikatakan bahwa, penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan.

Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) tersebut menjelaskan bahwa pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang belajar untuk mengetahui, mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia hidup

Menurut Jan Bella dalam Hasibuan & Malayu (2011) “Pendidikan dan pelatihan sama dengan pengembangan yaitu merupakan proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama, dan biasanya lama dan biasanya menjawab “*why*”. Latihan berorientasi pada Praktek, dilakukan di lapangan, berlangsung singkat dan biasanya menjawab “*how*”.

## **2.2. Anggaran Pendidikan**

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan, dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari.

Anggaran pendidikan merupakan biaya atau dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orangtua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang

hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar (Fattah, 2008).

### 2.3 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai atau bisa dikatakan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya (Abdurahmat, 2013).

Menurut Yinger & Hendricks-Lee (2012) *Output* merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang di hasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian *Outcome* program atau *Outcome* fokus prioritas sedangkan *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sementara itu *National Ecosystem Assessment* (NEA) (2011) lebih mempertegas dengan menyebutkan perbedaan antara *Output* dengan *Outcome* yaitu *Output* merupakan hasil dari aktifitas, kegiatan atau pelayanan dari sebuah program. *Output* diukur dengan menggunakan istilah volume (banyaknya). Sedangkan *Outcome* adalah dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau pelayanan suatu program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan hubungan arti efektivitas di bawah ini. (Mahmudi, 2011)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}}$$

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan *Output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat pada bulan Januari sampai Juni 2022. Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Adapun yang menjadi ruang lingkup yang diambil oleh penulis adalah anggaran pendidikan tahun 2017 – 2021. Metode analisis yang di gunakan adalah motoden kuantitatif yaitu dengan menganalisis tingkat efektivitas pengelola keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja maka peneliti menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi belanja Pendidikan}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Dimana :

Realisasi belanja : Semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang mengurangi ekuitas dana lancar yang di hitung dalam satuan Rupiah (Rp)  
Target belanja : Sasaran belanja desa dalam tahunan yang di hitung dalam satuan Rupiah (Rp)

Standar efektivitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pendapat Mahmudi (2011) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100 % berakti sangat efektif
- b. Hasil perbandingan antara 90% - 100 % berakti efektif
- c. Hasil perbandingan antara 80% - 90 % berakti cukup efektif
- d. Hasil perbandingan antara 60% - 80 % kurang efektif
- e. Hasil perbandingan di bawah 60% berakti tidak efektif

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis keuangan daerah pada prinsipnya dimanfaatkan untuk memberikan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu sebelum penentuan arah Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Aceh Barat.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pendanaan Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi : a) Pendapatan Daerah; b) Belanja Daerah; c) Pembiayaan Daerah. Dari struktur APBD tersebut untuk dapat menilai kinerja pelaksanaan APBD dilakukan dengan menganalisa dari masing-masing susunan/struktur APBD dimaksud dan perkembangan Neraca Daerah. Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah atasan maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi, oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi Perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan

produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja menganggur. Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli masyarakat akan semakin rendah. Kebijakan keuangan diarahkan pada :

- a. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap;
- b. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya;
- c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui penajaman pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

### **Analisis efektivitas Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat**

Efektivitas Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi belanja Pendidikan}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

#### **a. Efektivitas Tahun 2017**

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{259.450.004.535,02}{265.530.314.009} \times 100\% \\ \text{Efektivitas} &= 97,71 \%\end{aligned}$$

#### **b. Efektivitas Tahun 2018**

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{264.947.713.920,26}{291.077.983.938} \times 100\% \\ \text{Efektivitas} &= 91,02 \%\end{aligned}$$

#### **c. Efektivitas Tahun 2019**

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{322.636.159.596,00}{344.827.637.164} \times 100\% \\ \text{Efektivitas} &= 93,56 \%\end{aligned}$$

#### **d. Efektivitas Tahun 2020**

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{237.564.722.941,00}{247.564.722.941,00} \times 100\% \\ \text{Efektivitas} &= 95,96\%\end{aligned}$$

#### **e. Efektivitas Tahun 2021**

$$\text{Efektivitas} = \frac{218.160.690.178}{249.671.841.718} \times 100\%$$

Efektivitas = 87,38 %

Selanjutnya hasil perhitungan tersebut dikelompokkan dalam tabel guna memudahkan dalam interpretasi dan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1** Rasio Efektivitas Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Rasio Efektivitas (%)	Tingkat Eektivitas
1	2017	97,71	Efektif
2	2018	91,02	Efektif
3	2019	93,56	Efektif
4	2020	95,96	Efektif
5	2021	87,38	Efektif

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1 diatas diperoleh bahwa hasil perhitungan rasio efektivitas penyerapan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat dapat digambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (efektifitas). Dari hasil perhitungan rasio Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat selalu mengalami perubahan nilai persentase. Diawali pada tahun 2017 rasio efektifitas adalah sebesar 97,71 % dan pada tahun 2018 menjadi 91,02%. walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan nilai persentase dari tahun sebelumnya, tetapi tetap di kriteriakan efektif, tahun 2019 sebesar 93,56% dan tahun 2020 rasio efektifitas kembali meningkat menjadi 95,96% kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 90,75 %.

Jadi pada dasarnya didalam analisis rasio efektifitas diketahui bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau maksimal 100 (seratus) persen. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sesuai hasil perhitungan rasio tadi dapat digambarkan kemampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat didalam menjalankan tugasnya sudah stabil karena mengalami peningkatan yang signifikan. Maknanya, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat sudah efektif yang sesungguhnya karena rasio efektifitasnya sebagian besar sudah mencapai angka 1 (satu) atau 100 (seratus) persen.

Hal yang menyebabkan analisis efektivitas ini cukup efektif hingga sangat efektif karena realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai akan memengaruhi kriteria efektivitas pelaksanaan anggaran belanja. Jika realisasi anggaran belanja lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran belanja, maka semakin efektif pelaksanaan belanja anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Melania Rampengan, Grace B. Nangoi, Hendrik Manossoh (2016) yang menunjukkan hasil analisis efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) Kota Manado dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kriteria meskipun belum mencapai kriteria sangat efektif, di mana

pada tahun 2011 (kurang efektif) sampai 2015 (cukup efektif), hal ini disebabkan karena adanya kegiatan yang dianggarkan tapi belum dilaksanakan.

## **5. KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, dapat di lihat dari hasil pengukuran tingkat efektivitas sebagai berikut: Tingkat atau kriteria efektivitas Penyerapan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017-2021 mempunyai kriteria efektivitas yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2017 dan yang terendah terjadi pada tahun 2021. Pada tahun 2017 kriteria efektivitas nya sangat efektif, pada tahun 2018 sampai 2021 kriteria efektivitas nya efektif. Ini menunjukkan bahwa efektivitas Penyerapan Anggaran yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari cukup efektif menjadi sangat efektif.

### **Saran**

Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat dari segi efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja agar mempertahankan tingkat efektivitas yang tiap tahunnya mengalami perubahan yang sangat baik di mana tingkat kriteria dari cukup efektif menjadi kriteria yang sangat efektif. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sama, sebaiknya meneliti variabel-variabel lain yang mempengaruhi efisiensi kinerja instansi pemerintah seperti kepemimpinan, penegakan hukum yang konsisten dan dapat memperluas pengambilan sampel.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Rektor Universitas Teuku Umar, Ketua LPPM-PMP, Ketua Koordinator Pusat Pemagangan dan KKN, Dekan Fakultas Ekonomi, Para Wakil Dekan, Kaprodi/Sekprodi EKP, Dosen/Staf, Pembimbing DPL, Pembimbing KTI dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Staf Kabupaten Aceh Barat dan teman-teman EKP FE UTU.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurahmat. (2013). *Efektivitas Organisasi* (1st ed.). Airlangga.
- Anggara, S., & Pilawati, P. (2019). Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 92–106.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*.
- Baswir, R. (2010). *Ekonomi kerakyatan vs neoliberalisme*. Delokomotif.
- Brown, C. W., & Ghiselli, E. E. (1955). Scientific Method in. *Encyclopedia of Anthropology*, Ed. David E. Hunter and Phillip Whitten (New York: Harper & Row, 1976), 343.

- Danim, S. (2012). Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. *Rineka Cipta Jakarta Perkantoran Mitra Mataram*.
- Epidemiologi, B. J. (2010). Manajemen Demam Berdarah Berbasis Wilayah. *Pusat Data Dan Surveilans Epidemiologi Kementerian Kesehatan RI*.
- Fattah, A. A. L. A. M. (2008). *Governance Reform: Stepping Stone to the Implementation of Decentralization Policy in the UAE Education System*. The British University in Dubai (BUiD).
- Handayani, J. D., Irfan, I., & Sari, C. P. M. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan (JAKTABANGUN) STIE Lhokseumawe*, 3(3), 38–48.
- Hasibuan, & Malayu, S. P. (2011). Dasar Manajemen, Pengertian dan Masalah. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Hj, S. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Cetakan I. Mandar Maju Bandung.
- Janur, M. Y. (2009a). Analisis Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Sesudah Otonomi Daerah. *Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Selatan*.
- Janur, M. Y. (2009b). Analisis Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Sesudah Otonomi Daerah. *Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Selatan*.
- KBBI, E. K. (2003). *Jakarta: Balai Pustaka*. Indonesia.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmudi. (2011). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN.
- Martadisastra, U. (2002). Azas-Azas Manajemen Konsep dan Aplikasinya. *Bandung: Dinarnika*.
- Rachman, S. M. (2017). *Analisis penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ritonga, M. P. (2020). *Hubungan tingkat pendidikan orangtua dengan pembinaan agama anak di Kelurahan Ujung Padang Lingkungan 1 Kota Padangsidempuan*. IAIN Padangsidempuan.
- Sutrisno. (2021). Improvement Of Human Resources Competence With Academic Quality Policy In The Economic Sector Of Higher Education Providers In East Java. *Transformational Language, Literature, and Technology Overview in Learning (TRANSTOOL)*, 1(1), 19–28.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.55047/transtool.v1i1.104>
- Yinger, R., & Hendricks-Lee, M. (2012). Working knowledge in teaching. In *Research on Teacher Thinking (RLE Edu N)* (pp. 108–131). Routledge.